BAB III METODOLOGI DESAIN

3.1 Sistematika Perancangan



Gambar 3. 1 Sistematika Perancangan DnD

Sistematika perancangan antarmuka pengguna dengan menggunakan pendekatan Define and Design (DnD). Pendekatan ini terdiri dari dua tahap utama:

- 1. Define: Tahap pertama berfokus pada pemahaman masalah dan kebutuhan pengguna melalui riset, wawancara, dan observasi. Pada tahap ini, informasi yang terkumpul digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan serta menentukan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Langkah-langkah dalam tahap ini termasuk pengumpulan data, analisis data pengguna, analisis pesaing, penentuan konsep rancangan, dan pemilihan jenis media yang sesuai.
- 2. Design: Tahap kedua adalah merancang solusi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Desainer membuat sitemap, user flow, wireframes, dan desain berfidelity tinggi (Hi-Fi) yang akan diuji dan dievaluasi berdasarkan umpan balik pengguna. Pengujian kegunaan juga dilakukan untuk memastikan desain sesuai dengan harapan pengguna.

Dengan pendekatan DnD ini, desain dan pengembangan dilakukan secara iteratif untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah dipahami, yang selaras dengan filosofi Norman (1990) dalam bukunya "The Design of Everyday Things". Pendekatan ini membantu merancang aplikasi yang fungsional dan dapat diuji melalui umpan balik dari pengguna.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode kualitatif. Moleong menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dengan cara mengeksplorasi pengalaman hidup, persepsi, serta pandangan orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada cara individu yang terlibat dalam suatu peristiwa atau situasi mengartikan dan memahami pengalaman tersebut, dengan menekankan sudut pandang orang yang langsung terlibat. (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan beberapa langkah berikut:

1. Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber penelitian ilmiah, seperti jurnal, buku, dan artikel, sebagai dasar untuk menyusun perancangan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk memahami isu-isu kekerasan wanita, cara menangani, UI, dan berbagai aspek lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, untuk mendapatkan data yang mendalam. Fokus: Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan kaya makna, terutama dalam penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman subyektif dari responden. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2017).

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber ketua satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) Universitas Pembangunan Jaya, yang berpengalaman dalam bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara *offline* untuk mengetahui proses dan cara narasumber menangani kasus. Serta wawancara dengan Digital Product Manager yang telah memiliki pengalaman tentang perancangan UI/UX aplikasi supaya penulis mengetahui perancangan UI/UX yang baik untuk pengguna. Peneliti

juga mewawancarai pengguna yang sering pergi sendirian menggunakan transportasi umum.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan analisa pesaing yaitu mengamati aplikasi keamanan dan perlindungan yang telah ada saat ini, seperti Life bSafe dan iSharing, yang menjadi fokus penelitian, serta analisa aplikasi dengan desain terbaik untuk di *breakdown* isinya, seperti strukturnya, *flow*-nya, sampai visualnya. Melalui studi tersebut, diperoleh gambaran mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna dalam situasi yang membutuhkan keamanan dan perlindungan.

3.3 Hasil Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

1. Wawancara Ketua Satgas Korban Pelecehan

Proses wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai pemahaman tentang perlindungan wanita dan proses penanganannya dilakukan secara *offline*. Narasumber pertama bernama Maria Jane Tienoviani Simanjuntak, S.Psi., M.Psi., merupakan psikolog serta ketua satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) UPJ. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 15:00 WIB. Hasil wawancara:

- a. Pencegahan dan Pembuktian Kasus
 - Sebelum merancang aplikasi, sangat penting untuk menentukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan bukti yang kuat, seperti gestur atau suara korban, agar laporan kekerasan dapat dipertanggungjawabkan dan efektif.
- b. Fitur yang Membuat Korban Tenang Aplikasi harus memiliki fitur yang memberikan rasa aman kepada korban, seperti opsi untuk melapor dengan anonimitas, serta akses mudah ke bantuan hukum atau konseling.
- c. Meningkatkan Kesadaran Korban untuk Melapor

Aplikasi harus dirancang untuk memotivasi korban melaporkan kekerasan yang dialami dengan memberikan panduan yang jelas, mudah dipahami, dan memberi rasa aman untuk melapor tanpa takut akan pembalasan atau stigma sosial.

d. Abuse of Power

Abuse of power, baik fisik maupun seksual, dapat sangat merusak bagi korban. Aplikasi harus memberikan ruang aman bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami, dengan kemudahan dalam proses pelaporan.

e. Desain Aplikasi yang Profesional

Desain aplikasi harus profesional, sederhana, dan tidak terlalu banyak visual yang bisa menambah kecemasan korban. Fokus desain harus pada penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

f. Bukti Konkret

Aplikasi harus menyediakan fitur untuk mengumpulkan bukti konkret, seperti rekaman suara, foto, atau video, untuk memastikan laporan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang cukup.

g. Komunitas Tempat Diskusi

Komunitas dapat berfungsi sebagai tempat dukungan bagi korban, namun jika tidak dikelola dengan benar, bisa menjadi tidak aman. Percakapan dalam komunitas harus dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kebocoran data yang merugikan korban.

h. Pengaruh Warna dalam Desain Aplikasi

Warna dalam aplikasi memiliki pengaruh besar terhadap perasaan korban. Warna yang menenangkan dapat membuat korban merasa lebih aman, sedangkan warna merah bisa digunakan untuk peringatan atau alert.

i. Pentingnya Memperhatikan UU Terkait

Aplikasi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual harus mematuhi Undang-Undang (UU) Kekerasan Seksual dan UU Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi, terutama di tempat kerja.

i. Jenis Tempat Kerja

Memahami jenis tempat kerja korban, apakah formal atau nonformal, penting untuk menyesuaikan aplikasi dengan regulasi dan prosedur yang berlaku di masing-masing tempat kerja.

k. Tindakan Setelah Notifikasi

Setelah korban menerima notifikasi dari aplikasi, langkah selanjutnya harus jelas, seperti memberi opsi untuk mencari jalan keluar lain atau mendapatkan bantuan dari pihak ketiga untuk memastikan korban tidak merasa terjebak.

1. Hotline Daerah dan Lembaga Pengaduan

Aplikasi harus menyertakan hotline lokal yang terhubung dengan lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan dukungan lebih lanjut dan membantu korban melapor dengan aman.

2. Wawancara *UI/UX*

Proses wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai pemahaman perancangan *UI/UX* aplikasi yang baik untuk pengguna dilakukan secara *online* melalui Zoom. Narasumber bernama Karabinar Dwika, merupakan Digital *Product Manager*. Hasil wawancara:

- a. Pemahaman *UI/UX*: Untuk membuat *UI/UX* yang baik, penting untuk mengikuti kebutuhan pengguna agar aplikasi dapat memenuhi harapan mereka.
- b. Metode Pembuatannya: Metode yang baik untuk perancangan *UI/UX* adalah dengan menggunakan pendekatan (*DnD*), yang mencakup langkah-langkah terstruktur untuk menciptakan

- aplikasi yang efektif, pendekatan ini jarang sekali ada yang tahu padahal sangat simpel dan *powerfull*.
- c. Jenis Aplikasi: Ada berbagai jenis aplikasi, ada yang digunakan setiap saat dan ada juga yang hanya digunakan saat dibutuhkan atau dalam situasi darurat, seperti Google, yang meskipun sangat terkenal dan *powerful*, tetapi hanya digunakan ketika diperlukan saja.
- 3. Wawancara Wanita Pengguna Transportasi Umum (User Persona)
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Keisha Khairunnisa, seorang pekerja kantoran berusia 25 tahun yang menggunakan transportasi umum seperti KRL dan ojek *online* setiap hari, ditemukan bahwa Keisha Khairunnisa sering merasa tidak aman saat pulang malam. Ia pernah mengalami *catcalling* dan didekati orang asing di stasiun, yang menjadi *pain point* utama dalam perjalanannya. Untuk itu, Keisha Khairunnisa membutuhkan fitur-fitur seperti *share location real-time*, *panic button* yang cepat diakses, laporan insiden yang bisa disimpan dan dikirim otomatis, serta peringatan saat keluar dari rute aman. Tingkat literasi teknologi yang menengah, Keisha Khairunnisa familiar dengan aplikasi seperti Gojek, WhatsApp, dan Google Maps. Tujuannya adalah untuk merasa lebih tenang selama perjalanan dan tahu ada sistem pendukung yang dapat membantu ketika menghadapi ancaman.

3.3.2 Aplikasi Perlindungan Perempuan

Analisa Pesaing dilakukan dengan mengamati aplikasi keamanan dan perlindungan yang telah ada saat ini, seperti bSafe dan Waze. Menganalisa fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna dalam situasi yang membutuhkan keamanan dan perlindungan.

a. bSafe

Dalam pengembangan 'Dara', kami mengidentifikasi bSafe yang berasal dari norwegia sebagai tolak ukur utama di industri aplikasi keamanan. Dengan menganalisis kekuatan visual dan kelemahan fungsional mereka, kita dapat merumuskan strategi diferensiasi yang jelas dan memastikan 'Dara' menawarkan solusi yang lebih unggul. bSafe menggunakan warna ungu yang unik, logo yang bersahabat (dengan ikon hati), dan *tagline* emosional "*Never walk alone*" menciptakan identitas yang peduli dan berkualitas tinggi. Meskipun kuat secara visual, bSafe memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengalaman pengguna (*UX*) yang membuka peluang strategis bagi "Dara".

Analisis Visual bSafe:

Visual	Warna	Tata Letak	Tipografi
Minimalis dan	Warna primer :	Sangat jelas tombol SOS	Sans-serif sederhana
fungsional, fokus	Ungu	sebagai titik fokus utama.	(kemungkinan Roboto
pada utility dalam			atau sejenis).
situasi darurat.			0

Analisis Fitur

Halaman	Alur	Visual Fitur	Alur
Home Screen	Saat selesei login/sign	-	A
.il 5G (6)	in, langsung muncul		
Safe Sour limited offer to try bSafe Premium ends	tampilan homescreen,		
Vour limited offer to try bSofe Premium ends	terdapat maps sebagai		
Profil dan setting guardian (Teman)	tampilan yang		57
7 7 7 7 7	menonjol dan tombol		
Tombol aktifin suara warning	SOS, selain itu terdapat		
Turn on / Turn off lokasi dimaps	4 tombol lain.		
ngezoom titik posisi user dimaps			
Tombol aktifasi suara			
8		" /-	
Follow mo Tombol darwst Tombol darwst	· · · · · ·		
Fake call [m Hare	7 1 1		
Follow Mo Folia Cott	9 0 1		

0







Analisis Kekurangan bSafe

- 1. Semua fitur darurat di bSafe (seperti tombol *SOS*, *Timer Alarm*, *Follow Me*) harus diaktifkan secara manual oleh pengguna.
- 2. Aplikasi tidak bisa mendeteksi secara otomatis jika pengguna masuk atau keluar dari area tertentu (seperti rumah, kampus, atau kantor).
- 3. Tidak ada mode grup atau *circle* seperti "Keluarga" atau "Tim kerja" yang bisa memantau satu sama lain dalam satu tempat.
- 4. Tidak terhubung langsung ke pihak resmi seperti 110 (Polisi), 119 (Ambulan), atau layanan darurat lokal lainnya.
- 5. Tampilan aplikasi dan alur penggunaan kurang ramah bagi pengguna lansia atau penyandang disabilitas.

Analisis Kekurangan bSafe

- 1. Dalam situasi berbahaya, seperti panik, ketakutan, atau saat diserang, pengguna belum tentu sempat membuka aplikasi dan menekan tombol.
- 2. Tidak ada fitur otomatis seperti deteksi suara teriakan, guncangan keras, atau jatuh tiba-tiba.
- 3. Tidak ada sistem peringatan otomatis saat pengguna keluar dari zona aman atau tidak tiba di tempat tujuan.
- 4. Semua harus diatur secara manual, seperti nyalakan "Follow Me" setiap kali jalan.
- 5. Semua pertolongan bergantung pada *guardian* pribadi.

- 6. Kalau mereka tidak merespons, tidak ada jalur bantuan resmi.
- 7. Kurang cocok untuk situasi darurat serius yang butuh petugas profesional.
- 8. Huruf dan tombol kecil → sulit dibaca oleh pengguna dengan gangguan penglihatan.
- 9. Tidak ada fitur perintah suara, navigasi suara, atau mode aksesibilitas.
- 10. Tidak ada integrasi dengan *wearable device* (seperti jam pintar atau *panic button* fisik).

Solusi Inovasi

1. Fitur *Auto-SOS / Smart Detection*

Gunakan sensor ponsel (*accelerometer*, mikrofon) untuk mendeteksi: Guncangan keras → jatuh atau dorongan, Teriakan → suara frekuensi tinggi, Ponsel ditarik paksa → gerakan cepat + ponsel terkunci, Jika terdeteksi → aktifkan *SOS* otomatis atau beri opsi batalkan dalam 5 detik.

- 2. Tambahkan Fitur Geofencing Otomatis
 - Pengguna bisa menandai lokasi penting: rumah, kantor, kampus, dll. Aplikasi akan, Kirim notifikasi otomatis jika pengguna tidak sampai tujuan dalam waktu tertentu. Kirim *alert* jika pengguna keluar dari zona aman pada jam yang tidak biasa.
- 3. Group Mode / Circle Mode Solusi
 - "Safe Circle" atau Komunitas Kepercayaan Buat 1 grup dengan anggota keluarga, teman kantor, teman kos, dsb. Dalam grup, bisa lihat lokasi semua anggota, kirim "check-in otomatis saat sampai tempat, Chat + update kondisi.
- 4. Integrasi Pihak Resmi (Polisi / Damkar)
 - Tombol SOS Langsung Terhubung ke 110/112 Tambahkan fitur "lapor instansi resmi" selain ke *Guardian* pribadi. Integrasikan dengan layanan darurat lokal $110 \rightarrow \text{Polisi}$, $112 \rightarrow \text{Damkar}$ (jika terjebak/dipaksa masuk ruangan). Tambahkan opsi *shared location* + rekaman suara dikirim ke database laporan darurat.



Gambar 3. 2 Visual Aplikasi bSafe

b. Waze

Waze adalah aplikasi navigasi berbasis GPS yang dikembangkan oleh Waze *Mobile* pada 2008 di Israel. Aplikasi ini mengandalkan data pengguna untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi jalan, termasuk kemacetan, kecelakaan, dan pengalihan arus. Pada 2013, Google mengakuisisi Waze seharga \$1,1 miliar, dan aplikasi ini tetap beroperasi di bawah Google. Waze kini menjadi salah satu aplikasi navigasi terpopuler di dunia.

Waze memungkinkan pengguna merencanakan rute perjalanan dengan memanfaatkan pembaruan lalu lintas secara *real-time*. Aplikasi ini membantu penggunanya menghindari kemacetan dan memilih rute tercepat berdasarkan kondisi terkini.



Gambar 3. 3 Sitemap Waze

Analisis fitur bSafe:

1. Halaman Utama



Pengguna membuka aplikasi dan langsung dihadapkan dengan layar utama yang menunjukkan peta interaktif serta tombol pencarian tujuan.

2. Mencari Tujuan



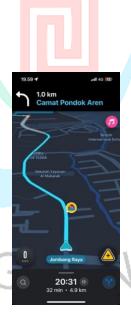
Pengguna dapat memasukkan alamat atau nama tempat di kotak pencarian. Aplikasi akan menampilkan beberapa pilihan tujuan berdasarkan lokasi atau nama yang dimasukkan.

3. Pemilihan Rute



Setelah tujuan ditentukan, Waze akan menampilkan beberapa pilihan rute dengan estimasi waktu tempuh dan informasi tentang kondisi jalan (kemacetan, kecelakaan, dll). Pengguna dapat memilih rute yang diinginkan.

4. Navigasi



Setelah memilih rute, aplikasi akan memberikan panduan navigasi dengan petunjuk suara dan visual secara *real-time*, termasuk pemberitahuan mengenai perubahan rute akibat kemacetan atau kondisi jalan.

5. Laporan Kondisi Jalan



Selama perjalanan, pengguna dapat melaporkan kondisi jalan yang sedang dihadapi, seperti kecelakaan, kemacetan, atau jebakan polisi. Laporan ini akan diperbarui di peta dan dibagikan dengan pengguna lain.

6. Tiba di Tujuan

Setelah sampai di tujuan, Waze akan memberi tahu pengguna bahwa mereka telah mencapai tujuan dan memberikan informasi tambahan jika ada tempat parkir di sekitar.

3.3.3 Pihak Berkepentingan

Dalam kasus yang berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan atau pelecehan, terdapat sejumlah lembaga yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan, seperti LBH APIK, pihak kepolisian, maupun layanan darurat lainnya seperti pemadam kebakaran, tergantung pada situasi yang dihadapi.

. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Kementerian ini bekerja untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan advokasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menghadapi

pelecehan seksual, KPPPA menyediakan berbagai saluran pelaporan, melibatkan lembaga bantuan hukum, serta melakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan. Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung korban dalam pemulihan, termasuk melalui penyuluhan, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dapat diproses secara hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menjadi mitra strategis yang mendukung implementasi dan advokasi solusi perlindungan digital bagi perempuan pekerja, khususnya dalam menangani isu pelecehan seksual. Kerja sama dengan kementerian ini memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di tempat kerja maupun ruang publik.

2. LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan



Gambar 3. 4 Logo LBH APIK

Asosiasi LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Indonesia, yang dibentuk pada 1995, mengkoordinasi 18 kantor LBH APIK di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. LBH APIK memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan kelompok rentan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemandirian, serta

menerapkan konsep Bantuan Hukum Struktural Berbasis Gender (BHGS). (LBH APIK Indonesia, n.d.)

Korban dapat melaporkan kasus kekerasan ke LBH APIK melalui email, WhatsApp, konsultasi langsung ke kantor cabang terdekat, atau datang langsung ke kantor LBH APIK Jakarta pada hari kerja. LBH APIK dijadikan mitra LSM karena memiliki banyak titik kantor diindonesia, sehingga memudahkan pelaporan per wilayah/daerah diindonesia.

2. Polisi

Layanan 110 merupakan layanan darurat bebas pulsa yang disediakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menerima laporan masyarakat selama 24 jam. Proses penanganan laporan melalui 110 secara umum meliputi tahapan berikut.

Panggilan Masuk, Masyarakat menghubungi 110 melalui telepon seluler atau rumah tanpa dikenakan biaya. Panggilan secara otomatis dialihkan ke *Command Center* Polri terdekat berdasarkan lokasi.

Respon Operator, Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan menjawab dan menggali informasi dasar seperti nama pelapor, lokasi, waktu kejadian, serta jenis kasus yang dilaporkan. Pelapor dapat bersifat anonim, khususnya dalam kasus sensitif seperti kekerasan atau pelecehan seksual.

Pencatatan dan Analisis Lokasi, Informasi laporan dicatat dalam sistem, kemudian dipetakan berdasarkan lokasi yang disebutkan atau melalui pelacakan BTS *provider*.

Koordinasi Lanjutan, Laporan diteruskan ke unit kepolisian yang sesuai, seperti Unit Patroli, Reskrim, Lalu Lintas, atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tergantung jenis kejadian.

Tindak Lanjut di Lapangan, Jika diperlukan, personel akan segera dikirim ke lokasi kejadian. Pelapor juga dapat diminta memberikan keterangan tambahan atau bukti pendukung untuk proses selanjutnya.

Kerahasiaan Terjamin, Polri menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan mendorong pelaporan tanpa rasa takut terhadap stigma sosial.

3. Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) dikenal sebagai lembaga penanganan kebakaran, namun juga berperan dalam situasi darurat *non*-kebakaran, seperti evakuasi korban dari ruang sempit, tempat tinggi, atau lokasi berbahaya. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Damkar dapat membantu ketika korban terjebak atau membutuhkan evakuasi cepat.

Meski demikian, Damkar tidak memiliki wewenang menangani aspek hukum kekerasan atau pelecehan seksual. Wewenang tersebut berada pada kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi kewenangan penuh kepada polisi untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menangani tindak pidana.

Karena itu, kolabor<mark>asi Damkar</mark>, kepolisian, layanan medis, dan bantuan hukum sangat penting, agar korban mendapatkan penanganan cepat, aman, dan sesuai hukum.

4. Komnas Perempuan

Meskipun Komnas Perempuan berperan penting sebagai lembaga nasional yang fokus pada perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis *gender*, namun dalam konteks perancangan aplikasi ini, penulis tidak menjadikan Komnas Perempuan sebagai rujukan utama untuk layanan pengaduan langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wewenang Komnas Perempuan dalam penegakan hukum serta prosedur pengaduan yang cenderung memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, pengisian formulir pengaduan di Komnas Perempuan sangat panjang dan memerlukan banyak detail, sehingga kurang ideal jika diterapkan dalam kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Sebaliknya, penulis memilih untuk merujuk pada LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) sebagai mitra pengaduan utama dalam desain aplikasi, karena lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, memberikan layanan bantuan hukum secara cepat, serta aktif dalam menangani kasus di lapangan secara langsung. Dengan pendekatan yang lebih praktis dan responsif, LBH APIK dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dirancang untuk merespons situasi darurat dan kebutuhan hukum secara cepat dan tepat.

3.4 Kesimpulan Analisis

Perancangan prototipe aplikasi perlindungan wanita ini dilandasi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan tempat kerja. Berdasarkan wawancara dengan pakar psikologi, *UI/UX*, serta pengguna transportasi umum, ditemukan kebutuhan akan aplikasi yang aman, mudah digunakan, dan responsif dalam situasi darurat.

Desain aplikasi menekankan pada fitur-fitur penting *seperti panic button,* share location real-time, pelaporan anonim, rekaman bukti konkret, hingga panduan bertindak pasca-kejadian. Visual aplikasi dibuat sederhana dan menenangkan, serta mendukung pengguna dengan tingkat literasi teknologi menengah.

Analisis terhadap aplikasi pesaing (bSafe) menunjukkan adanya kekurangan pada sistem otomatisasi dan koneksi ke pihak resmi. Oleh karena itu, aplikasi ini dikembangkan dengan fitur *auto-SOS*, *geofencing*, komunitas terpercaya (*circle mode*), serta integrasi langsung ke layanan darurat resmi seperti 110, 119, dan 112.

Dari sisi lembaga pendukung, LBH APIK dipilih sebagai mitra utama karena mampu memberikan bantuan hukum secara cepat dan langsung, berbeda dengan Komnas Perempuan yang lebih berperan sebagai wadah advokasi dengan proses pelaporan yang panjang. Kolaborasi antar lembaga seperti polisi, Damkar, dan UPTD PPA juga menjadi elemen penting dalam merespons kondisi darurat secara komprehensif.

Dengan pendekatan holistik ini, aplikasi dirancang untuk tidak hanya menangani kejadian saat terjadi, tetapi juga membantu pencegahan dan pemulihan pasca-kejadian, sehingga mampu menjadi solusi perlindungan digital yang nyata dan berkelanjutan bagi perempuan.

.

